

PENGARUH BELANJA PEMERINTAH DAERAH DAN PENDAPATAN PERKAPITA TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (STUDI KASUS DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TENGAH)

Hadi Sasana

Fakultas Ekonomika dan Bisnis UNDIP Semarang

Jalan Prof Sudarto Tembalang

Abstrak

Selama era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk meningkatkan pendapatan mereka dan untuk menjalankan fungsi alokatif dalam menetapkan prioritas pembangunan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengeluaran pemerintah, pendapatan perkapita pada indeks pembangunan manusia di kabupaten/kota tingkat Provinsi Jawa Tengah. Populasi penelitian terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kotamadya, menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Tengah dan kabupaten / kota tingkat Provinsi Jawa Tengah dalam periode 2006 sampai 2008. Analisis data dilakukan dengan menggunakan Fixed Effect Model (FEM) dengan program perangkat lunak Eviews. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pengeluaran pemerintah pertama memiliki efek positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten/kota tingkat Provinsi Jawa Tengah. Kedua, pendapatan perkapita belum berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten/kota tingkat Provinsi Jawa Tengah.

Kata kunci : Indeks pembangunan manusia, pengeluaran pemerintah, pendapatan perkapita

Abstract

During the era of local autonomy and fiscal decentralization, local governments is provided with authority to increase their income and to conduct allocative function in setting priority of local development. This research is intended to examine the influence of government expenditure, income percapita on human development index at regencies/municipalities level in Central Java Province. Research population consist of 29 regencies and 6 municipalities, employing secondary data from Central Bureau of Statistic of Central Java Province and regencies/municipalities level in Central Java Province within the period of 2006 up to 2008. Data analysis is conducted by using Fixed Effect Model (FEM) with Eviews program software. The results of this study indicate that, first government expenditure has a positive and significant effect on human development index at regencies/municipalities level in Central Java Province. Second, income percapita has not significant effect on human development index at regencies/municipalities level in Central Java Province.

Key words : human development index, government expenditure, income percapita

Pendahuluan

Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia sudah dilakukan sejak tanggal 1 Januari 2001. Melalui otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintahan daerah memiliki wewenang untuk menggali pendapatan dan melakukan peran alokasi secara mandiri dalam menetapkan prioritas pembangunan. Diharapkan dengan adanya otonomi dan desentralisasi fiskal dapat lebih

memeratakan pembangunan sesuai dengan keinginan daerah untuk mengembangkan wilayah menurut potensi masing-masing.

Otonomi daerah yang sudah berjalan lebih dari sepuluh tahun di negara kita diharapkan bukan hanya pelimpahan wewenang dari pusat kepada daerah untuk menggeser kekuasaan. Hal itu ditegaskan oleh Kaloh (2002), bahwa otonomi daerah harus didefinisikan sebagai otonomi bagi rakyat daerah dan bukan otonomi “daerah” dalam pengertian wilayah/teritorial tertentu di tingkat lokal. Otonomi daerah bukan hanya merupakan pelimpahan wewenang tetapi juga peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Berbagai manfaat dan argumen yang mendukung pelaksanaan otonomi daerah tidak langsung dapat dianggap bahwa otonomi adalah sistem yang terbaik. Menurut Barzelay (1991) pemberian otonomi daerah melalui desentralisasi fiskal terkandung tiga misi utama, yaitu: (a) Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, (b).Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat. (c) Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.

Melalui otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintahan daerah memiliki wewenang yang besar untuk menggali pendapatan dan melakukan peran alokasi secara mandiri dalam menetapkan prioritas pembangunan. Diharapkan dengan adanya otonomi dan desentralisasi fiskal daerah dapat lebih memeratakan pembangunan sesuai dengan aspirasi lokal untuk mengembangkan wilayah menurut potensi masing-masing guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dampak pelaksanaan desentralisasi fiskal di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah terhadap kondisi makro ekonomi dan sosial menunjukkan hasil yang relatif baik meskipun belum optimal. Terdapat beberapa indikator untuk melihat kinerja pembangunan daerah. *Pertama*, dilihat dari hasil *output* pembangunan yang tercermin dalam Produk Domestik regional Bruto (PDRB). *Kedua*, dilihat dari aspek kemiskinan. *Ketiga*, dilihat dari kesejahteraan masyarakat dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Berdasarkan hasil perhitungan IPM di enam provinsi di Pulau Jawa, DKI Jakarta selalu menempati peringkat pertama di tingkat nasional, sedangkan untuk provinsi lain mengalami naik-turun dalam perkembangan IPM tersebut, tetapi menunjukkan adanya peningkatan kinerja. Khusus di Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah penduduk yang besar capaian IPM nya dalam kategori menengah, sehingga masih sangat perlu di tingkatkan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan manusia yang berkualitas. Berikut ini disajikan data IPM di enam provinsi di Pulau Jawa.

Tabel 1
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Pada 6 Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2005-2008

Provinsi	2005	2006	2007	2008
Banten	68,8	69,1	69,29	69,70
DKI Jakarta	76,1	76,3	76,59	77,03
Jawa Barat	69,9	70,3	70,71	71,12
Jawa Tengah	69,8	70,3	70,92	71,60
DI Yogyakarta	73,5	73,7	74,15	74,88
Jawa Timur	68,4	69,2	69,78	70,38

Sumber : Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2005-2008

Untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia dapat dicapai melalui peningkatan pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Jika seseorang memiliki pendapatan yang lebih besar maka orang tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidupnya selain hanya untuk memenuhi kebutuhan primernya seperti sandang, pangan, dan papan, tetapi juga dapat memenuhi kebutuhan lain seperti kesehatan dan pendidikan. Pendapatan yang dimaksud adalah pendapatan per kapita yaitu besarnya pendapatan rata-rata di suatu daerah dibandingkan dengan jumlah penduduknya. Pendapatan per kapita juga mencerminkan tingkat daya beli penduduk di suatu daerah, dengan semakin besarnya pendapatan maka semakin besar juga pengeluarannya.

Pemerintah dewasa ini memiliki peran yang besar dalam alokasi, distribusi dan stabilisasi. Pemerintah daerah dengan kewenangannya yang besar di era otonomi saat ini harus mampu mendayagunakan alokasi untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Kebijakan fiskal pemerintah daerah yang tepat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) diharapkan mampu meningkatkan indeks pembangunan manusia guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fenomena yang ada di daerah kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah menunjukkan, bahwa tidak semua daerah dengan jumlah belanja daerah yang tinggi memiliki indeks pembangunan manusia yang tinggi pula.

Berdasarkan pemikiran tersebut, studi ini menganalisis pengaruh realisasi belanja pemerintah daerah dan pendapatan perkapita terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Studi Kasus di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah). Tujuan studi ini adalah : menganalisis pengaruh realisasi belanja daerah dan pendapatan perkapita terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Metode Penelitian

a. Obyek Penelitian dan Sumber Data

Penelitian ini dilakukan di seluruh daerah kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah (meliputi 29 daerah kabupaten, dan 6 kota) selama periode waktu tahun 2006 sampai dengan tahun 2008. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu dokumen data yang ada pada BPS, Dinas atau Instansi terkait, dan literatur serta data-data lain yang dapat menunjang terselesaikannya penelitian ini. Sehingga datanya adalah panel, data panel (*pooling data*) merupakan penggabungan dari jenis data *cross section* dan data *time series* sebanyak 35 kabupaten/kota dan selama tahun 2006 – 2008.

b. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Penelitian ini menggunakan variabel endogen (dependen) dan variabel eksogen (independen). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah indeks pembangunan manusia, sedangkan untuk variabel independen adalah belanja pemerintah daerah, dan pendapatan perkapita. Adapun definisi operasional untuk masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

1. Belanja Pemerintah Daerah

Belanja pemerintah daerah meliputi realisasi belanja langsung dan belanja tidak langsung yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota selama periode penelitian, dalam satuan rupiah.

2. Pendapatan Perkapita

Pendapatan perkapita dalam penelitian ini diproksi dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, yaitu jumlah PRDB daerah kabupaten/kota dibagi dengan jumlah penduduk di daerah yang bersangkutan, dalam satuan rupiah.

3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dikeluarkan oleh Biro Pusat Statistik Jawa Tengah dengan rumus:

$$HDI = 1/3 \times [X1 + X2 + X3] \quad (1)$$

Dimana:

X1 = Indeks harapan hidup kelahiran

X2 = Indeks pendidikan = 2/3 (indeks melek huruf) + 1/3 (indeks rata-rata lama sekolah)

X3 = Indeks standar hidup layak

c. Alat Analisis

Dalam penelitian ini digunakan data panel, penggabungan dari jenis data *cross section* dan data *time series*, menghasilkan 105 observasi dengan model persamaan dasar sebagai berikut:

$$IPM = f(BLJ, PPK) \dots \dots \dots (3)$$

Dimana :

IPM = Indeks Pembangunan Manusia

BLJ = Belanja pemerintah daerah

PPK = Pendapatan perkapita

Model dasar (3) di atas diturunkan menjadi model ekonometrik sebagai berikut:

$$IPM_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 BLJ_{it} + \alpha_2 PPK_{it} + \mu_{it} \dots \dots \dots (4)$$

Penelitian ini menggunakan dummy wilayah, untuk melihat perbedaan perkembangan tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah selama tiga tahun dengan periode penelitian tahun 2006-2008. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode *Fixed Effect Model (FEM)* atau *Least-Squares Dummy Variable (LSDV)* model, dan sebagai *benchmark* adalah Kota Semarang karena sebagai ibu kota provinsi dengan kondisi perekonomian yang bagus. Setelah memasukkan variabel dummy wilayah pada model, maka persamaannya adalah sebagai berikut:

$$IPM_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 BLJ_{it} + \alpha_2 PPK_{it} + \alpha_1 D_1 + \alpha_2 D_2 + \alpha_3 D_3 + \alpha_4 D_4 + \alpha_5 D_5 + \alpha_6 D_6 + \alpha_7 D_7 + \alpha_8 D_8 + \alpha_9 D_9 + \alpha_{10} D_{10} + \alpha_{11} D_{11} + \alpha_{12} D_{12} + \alpha_{13} D_{13} + \alpha_{14} D_{14} + \alpha_{15} D_{15} + \alpha_{16} D_{16} + \alpha_{17} D_{17} + \alpha_{18} D_{18} + \alpha_{19} D_{19} + \alpha_{20} D_{20} + \alpha_{21} D_{21} + \alpha_{22} D_{22} + \alpha_{23} D_{23} + \alpha_{24} D_{24} + \alpha_{25} D_{25} + \alpha_{26} D_{26} + \alpha_{27} D_{27} + \alpha_{28} D_{28} + \alpha_{29} D_{29} + \alpha_{30} D_{30} + \alpha_{31} D_{31} + \alpha_{32} D_{32} + \alpha_{33} D_{33} + \alpha_{34} D_{34} + \mu_{it} \dots \dots \dots (5)$$

Model persamaan tersebut akan diregres dengan menggunakan metode *Ordinary Least Square (OLS)* dengan semi log. Sehingga persamaan menjadi sebagai berikut:

$$\text{LOGIPM}_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 BLJ_{it} + \alpha_2 PPK_{it} + \alpha_1 D_1 + \alpha_2 D_2 + \alpha_3 D_3 + \alpha_4 D_4 + \alpha_5 D_5 + \alpha_6 D_6 + \alpha_7 D_7 + \alpha_8 D_8 + \alpha_9 D_9 + \alpha_{10} D_{10} + \alpha_{11} D_{11} + \alpha_{12} D_{12} + \alpha_{13} D_{13} + \alpha_{14} D_{14} + \alpha_{15} D_{15} + \alpha_{16} D_{16} + \alpha_{17} D_{17} + \alpha_{18} D_{18} + \alpha_{19} D_{19} + \alpha_{20} D_{20} + \alpha_{21} D_{21} + \alpha_{22} D_{22} + \alpha_{23} D_{23} + \alpha_{24} D_{24} + \alpha_{25} D_{25} + \alpha_{26} D_{26} + \alpha_{27} D_{27} + \alpha_{28} D_{28} + \alpha_{29} D_{29} + \alpha_{30} D_{30} + \alpha_{31} D_{31} + \alpha_{32} D_{32} + \alpha_{33} D_{33} + \alpha_{34} D_{34} + \mu_{it} \dots \dots \dots (6)$$

Selanjutnya melakukan pengujian terhadap model untuk memenuhi asumsi asumsi OLS dengan menggunakan software *Eviews*. Uji asumsi klasik meliputi : Normalitas, Multikolinearitas, Autokorelasi, Heteroskedastisitas.

Hasil dan Pembahasan

a. Deskripsi Obyek Penelitian

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi di Pulau Jawa yang memiliki letak strategis, yaitu diantara tiga provinsi: Provinsi Jawa Timur; Jawa Barat; dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Secara geografis, Provinsi Jawa Tengah berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur di sebelah timur, Provinsi DIY dan Samudera Indonesia di sisi selatan, dan Provinsi Jawa Barat di sebelah barat, dan di sisi utara berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Letak Astronomis Provinsi Jawa Tengah berada pada 5° 40' sampai dengan 8° 30' Lintang Selatan dan antara 108° 30' sampai 111° 30' Bujur Timur.

Jawa Tengah memiliki luas wilayah sebesar 3,25 juta hektar atau sekitar 1,7 persen dari luas Indonesia atau 25,04 persen luas Pulau Jawa. Luas wilayah tersebut terdiri dari 991 ribu hektar (30,45 persen) lahan sawah dan 2,26 (69,55 persen) juta hektar bukan lahan sawah. Provinsi Jawa Tengah dengan pusat pemerintahan di Kota Semarang secara administratif terbagi dalam 35 kabupaten/kota yang terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota.

b. Kondisi Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia merupakan suatu ukuran kesejahteraan yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). IPM merupakan ukuran kesejahteraan untuk mendampingi indikator pendapatan per kapita (Todaro, 2003). IPM merupakan indeks gabungan dari tiga indikator yaitu *longevity* sebagai ukuran harapan hidup, pengetahuan yang diukur dengan melek huruf penduduk dewasa dan gabungan rasio pendidikan tinggi primer, sekunder, tersier bruto (berbobot sepertiga), dan standar hidup layak sebagaimana diukur dengan pendapatan per kapita. Berikut disajikan data rata-rata IPM dari 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2005-2009.

IPM pada 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2006-2008 dapat dilihat pada Tabel 2. Data pada Tabel 2 di bawah ini dapat dilihat bahwa besarnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah mengalami fluktuasi naik/turun dari tahun ke tahun. Selama periode penelitian tahun 2006 – 2008 Kota Surakarta memiliki nilai IPM tertinggi diikuti Kota Semarang sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah, sedangkan Kabupaten Brebes memiliki nilai terendah

Tabel 2
Kondisi IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006-2008

No.	Kabupaten/Kota	Tahun		
		2006	2007	2008
1.	Kab. Cilacap	69,8	70,25	70,91
2.	Kab. Banyumas	70,8	71,23	71,77
3.	Kab. Purbalingga	69,9	70,38	70,89
4.	Kab. Banjarnegara	68,3	68,54	68,99
5.	Kab. Kebumen	69,5	69,96	70,19
6.	Kab. Purworejo	70,2	70,68	71,29
7.	Kab. Wonosobo	68,8	69,22	69,55
8.	Kab. Boyolali	70,6	71,03	71,43
9.	Kab. Magelang	69,4	69,63	69,99
10.	Kab. Klaten	71,8	72,48	72,93
11.	Kab. Sukoharjo	71,7	72,046	73,01
12.	Kab. Wonogiri	69,9	70,11	70,47
13.	Kab. Karanganyar	71,1	71,59	72,21
14.	Kab. Sragen	67,8	68,98	69,57
15.	Kab. Grobogan	69,2	69,75	70,22
16.	Kab. Blora	68,4	69,11	69,63
17.	Kab. Rembang	69,7	70,54	71,12
18.	Kab. Pati	71,8	71,87	72,26
19.	Kab. Kudus	71,3	71,66	72,02
20.	Kab. Jepara	70,0	71,45	71,94
21.	Kab. Demak	70,3	71,05	71,56
22.	Kab. Semarang	72,2	72,93	73,34
23.	Kab. Temanggung	72,7	73,08	73,43
24.	Kab. Kendal	68,3	68,91	69,40
25.	Kab. Batang	68,4	68,64	69,23
26.	Kab. Pekalongan	69,4	69,69	70,31
27.	Kab. Pemasang	67,4	67,89	68,38
28.	Kab. Tegal	67,8	68,83	69,54
29.	Kab. Brebes	65,9	66,57	67,08
30.	Kota Magelang	75,5	75,69	76,09
31.	Kota Surakarta	76,4	76,58	77,16
32.	Kota Salatiga	75,1	75,37	75,81
33.	Kota Semarang	75,9	76,11	76,54
34.	Kota Pekalongan	72,5	73,10	73,49
35.	Kota Tegal	72,4	72,72	73,20

Sumber: Indeks Pembangunan Manusia, BPS (2004-2009)

Pendapatan Perkapita

Salah satu indikator penting untuk mengetahui peranan dan potensi ekonomi di suatu wilayah dalam periode tertentu ditunjukkan oleh data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Untuk melihat pendapatan rata-rata perkapita di suatu wilayah digunakan PDRB per kapita. PDRB per kapita dapat digunakan sebagai gambaran rata-rata pendapatan yang dihasilkan oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah atau daerah. PDRB per kapita diperoleh dari hasil pembagian antara PDRB dengan jumlah penduduk pada tahun tertentu. Tabel 3 berikut menyajikan PDRB per kapita dari 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 3
PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota Jawa Tengah Tahun 2006–2008 (Rupiah)

No.	Kabupaten/Kota	Tahun		
		2006	2007	2008
1.	Kab. Cilacap	6.181.619,6	6.454.372,01	6.743.837,13
2.	Kab. Banyumas	2.435.837,83	2.527.456,19	2.774.944,72
3.	Kab. Purbalingga	2.288.042,01	2.414.087,86	2.524.867,09
4.	Kab. Banjarnegara	2.640.296,51	2.753.624,17	2.866.393,38
5.	Kab. Kebumen	2.020.859,66	2.096.036,27	2.200.495,77
6.	Kab. Purworejo	3.405.602,61	3.602.376,69	3.789.441,58
7.	Kab. Wonosobo	2.099.787,23	2.164.192,89	2.229.811,50
8.	Kab. Boyolali	2.887.185,78	3.021.263,63	3.145.576,03
9.	Kab. Magelang	3.822.175,15	3.963.925,99	4.131.171,39
10.	Kab. Klaten	3.290.470,00	3.392.004,66	3.516.704,93
11.	Kab. Sukoharjo	5.000.457,94	5.222.682,35	5.440.423,48
12.	Kab. Wonogiri	2.250.979,60	2.307.122,28	2.311.917,76
13.	Kab. Karanganyar	5.230.684,26	5.688.489,19	5.928.001,14
14.	Kab. Sragen	2.836.602,95	2.982.978,18	3.138.157,71
15.	Kab. Grobogan	1.951.803,63	2.024.502,39	2.119.549,67
16.	Kab. Blora	2.066.973,02	2.143.565,81	2.255.307,05
17.	Kab. Rembang	3.238.868,59	3.349.670,90	3.460.334,82
18.	Kab. Pati	3.047.379,38	3.182.123,72	3.324.498,29
19.	Kab. Kudus	14.764.840,32	15.097.490,19	15.575.996,46
20.	Kab. Jepara	3.359.013,36	3.467.371,77	3.566.052,23
21.	Kab. Demak	2.464.338,34	2.562.473,16	2.597.944,23
22.	Kab. Semarang	5.182.888,83	5.410.191,08	5.573.831,80
23.	Kab. Temanggung	2.946.488,03	3.030.590,13	3.113.188,70
24.	Kab. Kendal	4.886.278,72	5.072.827,59	5.108.830,56
25.	Kab. Batang	2.921.290,64	3.001.953,42	3.094.222,61
26.	Kab. Pekalongan	3.046.868,37	3.152.304,95	3.075.568,58
27.	Kab. Pemalang	2.166.802,07	2.189.239,46	2.278.049,66
28.	Kab. Tegal	2.001.591,66	2.094.059,42	2.198.928,49
29.	Kab. Brebes	2.629.439,55	2.742.704,05	2.864.120,05
30.	Kota Magelang	7.612.207,32	78.284.777,93	8.000.412,12
31.	Kota Surakarta	7.93.0485,11	8.351.806,79	8.699.633,71
32.	Kota Salatiga	4.392.214,83	4.716.483,05	4.924.547,00
33.	Kota Semarang	12.053.338,15	12.651.241,91	12.990.524,22
34.	Kota Pekalongan	6.536.290,72	6.712.280,18	6.914.429,86
35.	Kota Tegal	4.291.327,99	4.502.553,60	4.705.899,88

Sumber: BPS 2006-2009, diolah

Berdasarkan data pada Tabel 3 menunjukkan bahwa laju pendapatan per kapita di wilayah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah sejak tahun 2006 – 2008 selalu mengalami kenaikan. Jika dilihat dari daerahnya, Kabupaten Kudus merupakan daerah yang paling tinggi nilai pendapatan per kapitanya, lalu diikuti Kota Semarang, dan Kabupaten Cilacap. Kabupaten Blora memiliki jumlah pendapatan perkapita yang paling rendah.

Belanja Pemerintah Daerah

Kebijakan pengeluaran pemerintah yang secara langsung dapat mendorong pertumbuhan ekonomi adalah belanja, karena variabel ini diwujudkan dalam bentuk pembangunan prasarana ekonomi dan sosial. Dalam PP No. 58 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No. 59 Tahun 2007 sebagai revisi Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah, klasifikasi belanja dalam sistem anggaran diperbaiki menjadi belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Belanja tidak langsung meliputi bagian belanja yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program. Belanja tak langsung terdiri dari : Belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan yang telah ditetapkan undang-undang, Belanja bunga, Belanja hibah, Belanja bantuan sosial, Belanja bagi hasil kepada propinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa, Belanja bantuan keuangan, serta Belanja tak tersangka. Besarnya belanja tidak langsung dari 35 daerah Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Tengah selama tahun 2006 hingga 2008 adalah sebagai berikut :

Tabel 4
Realisasi Belanja Tidak Langsung Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2006-2008 (Ribuan Rupiah)

No	Kabupaten/Kota	Tahun		
		2006	2007	2008
1.	Kab. Cilacap	484.991.498	560.285.542	707.958.719
2.	Kab. Banyumas	466.040.942	597.311.468	658.007.688
3.	Kab. Purbalingga	228.535.980	333.266.122	400.042.564
4.	Kab. Banjarnegara	297.452.097	383.437.858	469.276.079
5.	Kab. Kebumen	397.201.762	551.847.643	570.082.679
6.	Kab. Purworejo	330.576.716	374.837.144	483.618.947
7.	Kab. Wonosobo	260.741.341	330.630.111	380.431.983
8.	Kab. Magelang	384.432.366	525.010.355	574.669.542
9.	Kab. Boyolali	375.683.146	439.407.366	539.103.145
10.	Kab. Klaten	552.025.629	613.498.745	729.969.398
11.	Kab. Sukoharjo	310.603.941	380.022.856	473.547.968
12.	Kab. Wonogiri	365.307.715	425.504.792	570.069.057
13.	Kab. Karanganyar	311.063.094	388.800.575	513.938.463
14.	Kab. Sragen	351.355.729	403.162.973	512.599.806
15.	Kab. Grobogan	364.978.647	419.787.947	508.456.670
16.	Kab. Blora	303.800.304	361.336.349	472.784.247
17.	Kab. Rembang	250.749.148	283.408.602	352.330.388
18.	Kab. Pati	370.379.922	417.179.508	539.420.097
19.	Kab. Kudus	279.049.455	315.470.167	404.802.391
20.	Kab. Jepara	313.577.197	353.287.155	434.627.200
21.	Kab. Demak	286.130.768	363.086.771	448.296.802
22.	Kab. Semarang	289.884.906	361.212.928	466.232.704
23.	Kab. Temanggung	269.340.136	320.769.856	410.445.865
24.	Kab. Kendal	278.324.616	324.190.550	450.383.935
25.	Kab. Batang	261.224.977	290.125.395	336.936.167
26.	Kab. Pekalongan	300.303.280	370.609.640	454.652.269
27.	Kab. Pemasaran	304.658.238	363.964.883	481.657.038
28.	Kab. Tegal	348.919.448	402.876.321	530.657.950
29.	Kab. Brebes	397.309.488	503.463.087	608.875.665
30.	Kota Magelang	116.400.636	153.967.181	189.655.968
31.	Kota Surakarta	327.109.581	335.977.859	436.138.529
32.	Kota Salatiga	124.533.632	142.677.855	173.023.818
33.	Kota Semarang	434.321.403	556.164.478	745.048.470
34.	Kota Pekalongan	109.798.169	152.627.300	175.823.933
35.	Kota Tegal	121.830.918	131.780.063	170.442.127

Sumber : Statistik Keuangan Kabupaten/Kota Tahun 2005-2009

Dari data Tabel 4 di atas dapat dilihat bahwa Kota Semarang sebagai Ibu Kota Jawa Tengah memiliki jumlah belanja tidak langsung yang paling besar lalu yang kedua yaitu Kabupaten Klaten, dan yang ketiga yaitu Kabupaten Cilacap.

Sedangkan pada data realisasi belanja langsung dalam Tabel 5 terlihat bahwa realisasi belanja langsung tahun 2008 yang paling tinggi adalah Kota Semarang kemudian Kabupaten Cilacap lalu yang ketiga Kabupaten Pati. Daerah dengan realisasi belanja langsung terkecil adalah Kota Salatiga.

Tabel 5
Realisasi Belanja Langsung Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2006-2008 (Ribu Rupiah)

No	Kabupaten/Kota	Tahun		
		2006	2007	2008
1.	Kab. Cilacap	340.883.613	506.785.714	464.534.066
2.	Kab. Banyumas	253.944.078	273.593.198	315.925.155
3.	Kab. Purbalingga	205.267.990	223.485.908	307.731.909
4.	Kab. Banjarnegara	209.225.833	226.926.477	246.951.820
5.	Kab. Kebumen	221.229.516	343.907.755	289.163.670
6.	Kab. Purworejo	133.330.763	205.885.791	208.372.288
7.	Kab. Wonosobo	173.186.920	207.198.345	247.788.584
8.	Kab. Magelang	238.006.664	281.120.364	278.973.671
9.	Kab. Boyolali	154.394.060	299.090.292	254.158.963
10.	Kab. Klaten	177.380.726	253.597.660	270.165.401
11.	Kab. Sukoharjo	176.171.988	253.285.081	243.575.006
12.	Kab. Wonogiri	238.903.395	209.693.741	276.266.431
13.	Kab. Karanganyar	182.181.720	231.188.960	258.895.901
14.	Kab. Sragen	241.050.701	298.771.422	293.189.407
15.	Kab. Grobogan	217.187.065	319.906.379	362.817.722
16.	Kab. Blora	144.704.570	206.806.769	296.358.108
17.	Kab. Rembang	160.314.142	256.207.644	240.194.235
18.	Kab. Pati	205.443.708	330.211.211	360.699.075
19.	Kab. Kudus	197.237.023	288.316.285	321.521.034
20.	Kab. Jepara	226.143.017	317.730.393	309.447.161
21.	Kab. Demak	205.104.989	264.679.492	243.167.201
22.	Kab. Semarang	241.262.492	291.037.897	328.163.677
23.	Kab. Temanggung	154.346.547	182.974.820	200.894.327
24.	Kab. Kendal	274.638.455	273.427.001	305.944.373
25.	Kab. Batang	143.273.762	211.949.294	241.637.027
26.	Kab. Pekalongan	146.686.244	170.607.964	218.293.049
27.	Kab. Pemalang	278.486.275	287.159.184	285.510.918
28.	Kab. Tegal	256.099.012	300.439.508	342.074.412
29.	Kab. Brebes	236.390.812	344.080.883	364.367.459
30.	Kota Magelang	126.074.139	163.062.260	196.468.557
31.	Kota Surakarta	143.451.149	252.319.646	323.942.323
32.	Kota Salatiga	101.133.086	111.055.983	195.370.154
33.	Kota Semarang	492.902.908	574.681.766	580.253.139
34.	Kota Pekalongan	150.169.308	162.250.559	221.324.716
35.	Kota Tegal	169.981.238	201.801.685	222.757.917

Sumber : Statistik Keuangan Kabupaten/Kota Tahun 2005-2009

Pembahasan

a. Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Otonomi daerah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran daerahnya untuk menunjang pembangunan di daerah. Alokasi belanja melalui kewenangan daerah dalam era otonomi sangat tergantung pada kebijakan pemerintah daerah tersebut dengan persetujuan legislatif.

Hasil estimasi dari model yang digunakan menunjukkan bahwa realisasi belanja pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Pengaruh positif ini mengandung makna bahwa peningkatan belanja Pemda yang tepat untuk meningkatkan IPM yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah dapat meningkatkan IPM pada wilayah yang bersangkutan, demikian pula sebaliknya bahwa daerah kabupaten/kota yang memiliki belanja yang rendah untuk IPM cenderung lambat meningkatkan IPM di daerah tersebut.

Pengeluaran daerah sekarang ini terbagi atas belanja langsung dan belanja tidak langsung. Dalam bentuk belanja langsung pengeluaran dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana umum atau program-program langsung yang dapat merangsang produktivitas yang lebih besar bagi masyarakat serta pelaku usaha di daerah. Selain itu belanja pemerintah daerah juga diperuntukan bagi layanan dasar yang harus diperoleh masyarakat, yaitu pendidikan dan kesehatan. Dengan alokasi belanja langsung yang tepat maka pembenahan infrastruktur daerah serta fasilitas umum akan tetap baik, sehingga meningkatkan kualitas dan kuantitasnya serta meningkatkan produktivitas daerah, pendapatan masyarakat, dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Secara konseptual belanja tidak langsung memang tidak atau kurang menyentuh pada kebutuhan masyarakat umum dalam menjalankan usaha mereka. Namun demikian dengan alokasi penggunaan belanja tidak langsung secara tepat, akan menunjang kinerja dari masing-masing unit kerja dalam pelayanan kepada masyarakat.

Pemberdayaan dan pemihakan alokasi belanja daerah bagi peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar adalah keniscayaan bagi pembangunan di daerah dalam pelaksanaan otonomi. Indikator kinerja yang menunjukkan pencapaian *output* dan kualitas layanan yang semakin baik dapat menjadi penunjang berbagai aktivitas baik sosial maupun ekonomi masyarakat. Sehingga hasil, manfaat, dan dampaknya dapat dirasakan langsung atau tidak langsung bagi kepentingan sebesar-besarnya rakyat yang berujung pada peningkatan kesejahteraan.

b. Pengaruh Pendapatan Perkapita Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Hasil estimasi menunjukkan, bahwa pendapatan perkapita sebagai cerminan daya beli masyarakat tidak memiliki pengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Temuan ini mengandung makna bahwa pendapatan perkapita masyarakat di daerah kabupaten/kota Jawa Tengah belum mampu meningkatkan IPM di daerah tersebut, hal ini antara lain disebabkan oleh relatif kecilnya pendapatan yang dimiliki oleh masyarakat di Jawa Tengah. Kondisi ini berakibat pada alokasi konsumsi kebutuhan primer yang lebih besar, sehingga pengeluaran untuk bidang pendidikan dan kesehatan relatif terbatas. Akibatnya kualitas IPM kurang menjadi perhatian atau terabaikan.

Peran masyarakat yang semakin besar di tengah keterbatasan anggaran pemerintah sangat membantu mendorong program pemerintah meningkatkan IPM. Meskipun pengeluaran daerah dalam bentuk belanja langsung maupun tidak langsung cenderung meningkat setiap tahunnya, tetapi sangat tidak memadai dengan kebutuhan yang diperlukan. Dengan peran masyarakat dan swasta yang besar

maka akan meningkatkan produktivitas masyarakat, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan meningkatkan IPM.

Penutup

a. Simpulan

Berdasarkan pembahasan hasil analisis data dalam penelitian, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Realisasi belanja daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah berpengaruh positif dan signifikan dan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.
2. Pendapatan perkapita masyarakat di daerah kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah

b. Saran

1. Dalam era desentralisasi fiskal daerah dituntut untuk melakukan fungsinya secara efektif dan efisien, khususnya dalam program/kegiatan yang bertujuan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Oleh karena itu pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan kapasitas fiskalnya, dan menambah alokasi untuk program dan kegiatan yang terkait dengan peningkatan IPM.
2. Diharapkan pemerintah daerah tidak hanya mengejar peningkatan perekonomian saja, tetapi diperlukan *political will* yang kuat guna mewujudkan IPM yang tinggi, dengan meningkatkan sumber daya manusia sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Arsyad, Lincoln. 1999. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: bagian Penerbitan sekolah tinggi ilmu ekonomi YKPN
- Barzelay, M. 1991. "Managing Local Development, Lesson from Spain". *Policy Sciences*, 24, 271 – 290
- Biro Pusat Statistik. 2010. *Jawa Tengah Dalam Angka tahun 2006-2009*
- Beik, Irfan Syauqi. 2009. "Peran Zakat Mengentaskan Kemiskinan dan Kesenjangan" *Jurnal Ekonomi Islam Republika*, 29 Juli 2010, h.5
- Departemen Agama RI. 2002. *Al Quran dan Terjemah*, Semarang: PT. Karya Toha Putra
- Dumairi, 1996. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta : Penerbit Erlangga,
- Ghozali, Imam. 2005. *Structural Equation Modeling*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Mangkoesoebroto, Guritno, 2008. *Ekonomi Publik*, BPFY-Yogyakarta, Yogyakarta

- Mankiw, 2006. *Makro Ekonomi edisi keenam*, Erlangga, Jakarta
- Murjana, I.G.W., 2008. "Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Partisipasi Masyarakat di Provinsi Bali." *Jurnal Ekonomi dan Sosial*, h.87
- Prasetyo, Adit Agus. 2010. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan." *Skripsi Tidak Dipublikasikan*, Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Universitas Diponegoro
- Syahrul M., Ujang. 2009. "Pengaruh Anggaran Pengeluaran Pemerintah, Pendayagunaan Dana ZIS dan PDRB Per Kapita Terhadap Kemiskinan (Studi Kasus DKI Jakarta Tahun 1987-2002)." *Tesis Tidak Dipublikasikan*, Pusat Studi Timur Tengah dan Islam, Universitas Indonesia
- Simanjuntak, Payman J. 1998. *Pengantar Ekonomi Sumberdaya Manusia*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta
- Suparmoko, 2002. *Ekonomi Publik Untuk Keuangan & Pembangunan Daerah*, Andi, Yogyakarta
- Tambunan, Tulus TH 2001, *Perekonomian Indonesia : Teori dan Temuan Empiris*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Teguh Dartanto dan Bambang PS Brodjonegoro, 2003. "Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesenjangan Daerah : Analisa Model Makro Ekonometrik Simultan", *Indonesian journal of Economics and Development*, Vol.4 No.1 Juli 2003. Hal. 17-37. Jakarta : FE UI
- Todaro dan Smith, 2003. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Erlangga, Jakarta
- UNDP, 1994. *Human Development Report*. New York : Oxford University Press
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah*.
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah*
- World Bank. 2006. *Era Baru Dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*, available: <http://www.worldbank.org>